

Pendidikan Multikultural sebagai Kebijakan Keagamaan di Indonesia

ACHMAD FEDYANI SAIFUDDIN

Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia

Members of a religious community have naturally stereotypical opinion about those of other religious communities. It is a universal thing in the interaction amongst religions of the complex Indonesian people, with complexity gap from the past up to now not yet filled by strategic concepts in an attempt to build mutual understanding, tolerance, harmony, and cooperation amongst people. One of the most effective strategy for building those integrative attitudes is to realize a multicultural education. Through this cultural approach, it is hoped that Indonesia as the plural state consisting of a great deal of races, ethnicities, religions, languages, and cultures will be able to maintain its structural equilibrium in global dynamics. This essay will endeavour to explore the importance of the multicultural education in the plural society. Through his analytic study, the writer highlights the needs for the government to strengthen the religious followers integration through the programs of the multicultural education in Indonesia.

I

Agama dan Negara

Agama didefinisikan sesuai dengan sudut pandang yang kita gunakan.

Kalau kita melihat agama dari sudut pandang intrinsic kebudayaan, maka secara singkat agama, meminjam definisi Edward B. Tylor (1874) adalah “keyakinan akan adanya entitas spiritual”. Akan tetapi, kalau

kita menggunakan definisi yang lebih kompleks, maka agama adalah “suatu system symbol yang bekerja memantapkan suasana jiwa dan motivasi yang mendalam, dan bertahan lama pada diri manusia dengan memformulasikan konsepsi-konsepsi keteraturan umum mengenai keberadaan dan menyelimuti konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas sehingga jiwa dan motivasi tersebut seolah-olah secara unik nyata ada, sebagaimana diformulasikan Clifford Geertz (1966).

Dalam kehidupan manusia, agama menjadi seperangkat pedoman hidup, yakni satu-satunya pedoman yang dapat menjelaskan keberadaan manusia kini, asal-usulnya, dan masa depannya setelah mati. Tidak ada pedoman lain dalam kebudayaan manusia yang mampu memberikan penjelasan mengenai eksistensi manusia selengkap yang diberikan agama. Sebagai kompleks ajaran, agama bersifat netral, karena secara intrinsic agama tidak akan mengenakan sanksi apa pun apabila manusia mengingkarinya, tidak meyakinkannya, atau bahkan menentanginya. Mengapa demikian? Karena agama adalah perangkat doktrin keyakinan dan moral yang termaktub dalam ayat-ayat suci. Manusialah yang kemudian menjadikannya faktual sebagai bagian integral dari

ini agama adalah penganjur perdamaian, kebajikan, kasih sayang, dan persaudaraan. Kekacauan dan kerusuhan di mana-mana seharusnya berakhir pada doktrin agama mengenai keselamatan bersama itu, kembali ke hakikat Khalik yang menciptakan mahluk. Agar prinsip dasar “agama adalah agama” ini terwujud, institusi sentral agama harus steril terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Untuk itu, agama tampaknya harus bersedia selalu konservatif, karena kalau tidak, ia akan berbenturan dengan batas-batas kesakralannya sendiri sebagai pelabuhan terakhir mahluk manusia. Dalam kenyataan, sukar kita menemukan pada jaman kini suatu institusi agama yang tidak tercemar sama sekali dengan permulaan duniawi di luar diri agama. Bukankah pada masa kini hampir tidak ada institusi agama-agama besar yang tidak membutuhkan uang demi tetap hidup? Berarti institusi agama sangat terkait dengan ekonomi dan politik.

Kedua, agama dan negara terikat satu sama lain (integralistik) dalam pengertian bahwa agama memberi corak dominan atas negara. Dalam konteks ini agama bermain penuh sebagai instrumen, yakni aktualisasi agama di dalam sebagian besar institusi negara, seperti institusi

politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Apabila perangkat doktrin agama sudah mengalami internalisasi dalam pikiran manusia, menjadi bagian dari kebudayaannya, maka ajaran-ajaran tersebut menjadi luwes untuk diinterpretasi sesuai dengan kepentingan dan lingkungannya. Adanya anekaragam variasi praktek keagamaan di muka bumi adalah hasil interpretasi kebudayaan. Interpretasilah, sebagai contoh, yang membuahkan sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, negara Roma-Katolik, dan seterusnya. Oleh karena setiap agama diyakini secara mutlak oleh penganutnya, maka dalam kehidupan yang nyata sukar bagi segolongan penganut agama tertentu menerima praktek kenegaraan yang berasas sepenuhnya pada agama lain yang tidak diyakininya. Akibatnya, perbedaan agama yang pada dasarnya netral dapat berubah menjadi rasionalisasi perang ideologi.

Ketiga, agama ditempatkan dalam suatu sistem negara yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan. Agama direduksi menjadi salah satu unsur saja dari sistem yang dipandang saling tergantung dengan unsur-unsur lain. Agama ditempatkan dalam suatu sistem negara yang mengutamakan harmoni dan kese-

imbangan. Kebijakan-kebijakan yang merupakan konkretisasi pendekatan sistemik ini jelas sekali menekankan kontrol yang tegas terhadap unsur-unsurnya, termasuk unsur agama, agar selalu terwujud keteraturan yang harmonis tanpa goncangan. Setiap kali ada gejolak sekecil apa pun, langsung diredam oleh negara (pemerintah) sehingga keseimbangan tercapai kembali. Pendekatan sistem ini langsung menempatkan negara (pemerintah) dalam kedudukan sentral, dan agama menjadi instrumen yang penting bagi negara. Keberhasilan negara menggunakan agama sebagai instrumen yang penting menjadikan posisinya semakin kuat. Negara berkembang menjadi otoriter karena akumulasi kekuasaan di tangannya. Salah satu indikator adalah semakin pentingnya kedudukan dan peranan aparat keamanan. Memelihara harmoni diterjemahkan menjadi "menjaga keamanan dan ketertiban". Akumulasi kekuasaan yang berada di satu tangan mendorong penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, perbedaan tingkat kesejahteraan pusat-daerah, merosotnya pranata-pranata kebudayaan di desa-desa, dan hilangnya kemandirian daerah

merupakan produk yang lajim ditemukan pada negara-negara yang menganut pendekatan sistem yang mengutamakan keseimbangan itu. Tak terkecuali agama sebagai bagian dari sistem.

II

Pendidikan Multikultural sebagai Kebijakan Keagamaan

Kebijakan Keagamaan demi Pembangunan

Kebijakan keagamaan di Indonesia telah menempuh jalan yang panjang. Kalau kita menengok kembali tiga kemungkinan skenario politik keagamaan di atas—meski tidaklah berarti bahwa ketiga skenario itu mempunyai batas-batas yang ketat, karena di berbagai titik, tumpang-tindih bagian-bagian dari skenario itu mungkin terjadi—kebijakan keagamaan di Indonesia dapat kita masukkan kedalam skenario ketiga. Kebijakan keagamaan di Indonesia biasanya disusun dan dilaksanakan demi pembangunan nasional yang terdiri dari dua dimensi. Pertama, dimensi intra-umat beragama, yakni tujuan kebijakan

keagamaan untuk mencapai “terpeliharanya kesatuan dan persatuan umat beragama di Indonesia”. Dalam dimensi ini, agama diyakini oleh negara sebagai unsur yang sangat penting dan menentukan kestabilan negara. Salah satu konsep penting dalam konteks ini adalah yang disebut *dialog antar umat beragama* yang dalam kenyataan sebenarnya adalah dialog antara beberapa tokoh agama dari beberapa agama saja. Dalam hal ini, beberapa istilah populer kita kenal seperti toleransi, kerjasama, kerukunan, saling menghargai, dan lain-lain yang sejenis. Melalui dialog yang biasanya diprakarsai oleh negara (baca: pemerintah) itu para tokoh membangun kesepakatan-kesepakatan, yang diasumsikan agar dipersepsi, diterima, dan dinilai sama oleh seluruh umat dari agama masing-masing, untuk memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama, dan demi tetap kokohnya negara kesatuan Indonesia. Ini adalah contoh, agama dijadikan instrumen untuk kestabilan negara di mana tokoh-tokoh agama menjadi tokoh-tokoh perantara yang mengatasnamakan seluruh umat dari setiap agama. Suatu contoh yang terpenting dalam sejarah umat beragama di tanah air adalah kasus konflik-konflik di

Maluku yang mengatasnamakan agama-agama. Kalau kita perhatikan dengan cermat, proses pencarian solusi dari keadaan konflik tersebut juga bertumpu pada dialog tokoh-tokoh agama yang terlibat.

Kedua, dimensi ekstra-umat beragama, bahwasanya kebijakan keagamaan itu bertujuan meningkatkan taraf kehidupan seluruh rakyat Indonesia, terlepas dari agama apa pun yang mereka anut. Salah satu ciri yang menonjol dari dimensi ekstra-umat beragama ini adalah digunakannya bagian-bagian dari ajaran agama sebagai pendorong bagi pembangunan, yang tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup rakyat. Suatu contoh yang cukup kita kenal adalah digunakannya ayat-ayat tertentu Al Qur'an, yang disosialisasikan melalui tokoh-tokoh agama juga, untuk melegitimasi berlakunya program Keluarga Berencana pada tahun 1970an hingga 80an. Dampaknya, paling tidak hingga awal tahun 1990an, rintangan terhadap program ini mengecil secara signifikan dibandingkan sebelum 1970an, yang pada masa itu penentangan, khususnya dari para tokoh agama, sangat keras.

Dalam konteks negara dan agama, negara (baca: pemerintah) memerankan diri sebagai wasit

sekaligus pemain dalam hubungan antar umat agama besar. Untuk melestarikan peranan itu, negara membentuk secara resmi Departemen Agama yang secara khusus mengurus hal-hwal keagamaan di Indonesia. Meski pun pada saat ini Kebijakan Otonomi Daerah telah dijalankan, namun berbeda dari departemen-departemen lain yang telah "didaerahkan", artinya telah melimpahkan sebagian besar wewenangnya ke daerah-daerah, sedangkan Departemen kini memfungsikan diri sebagai fasilitator, Departemen Agama adalah salah yang satu yang tetap merupakan urusan Pusat. Dengan kata lain, Departemen Agama tidak akan melimpahkan wewenangnya sebesar yang dilakukan departemen-departemen lain. Hal ini mencerminkan bahwa agama tetap dipandang oleh negara sebagai instrumen kunci dan strategis.

Pendidikan Multikultural

Dari uraian di atas cukup jelas bagi kita bahwa agama pada dasarnya netral namun fleksibel. Dikatakan netral karena agama mana pun sebagai doktrin sesungguhnya bertujuan membawa kebaikan bagi manusia, dan dikatakan fleksibel karena sifatnya yang instrumental, yakni

kerentanannya terhadap kecenderungan utilisasi oleh aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia, terutama politik dan ekonomi. Agama seringkali dijadikan instrument legitimasi kepentingan politik, dan/atau bagi meningkatkan taraf kehidupan ekonomi suatu masyarakat.

Secara alamiah penganut setiap agama memiliki penilaian stereotipikal terhadap penganut agama lain. Hal ini lumrah dalam interaksi antar agama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, yang kemajemukan itu sejak dahulu hingga sekarang belum berhasil dijumpai oleh konsep-konsep strategis yang berupaya mengembangkan saling pengertian, toleransi, kerukunan dan kerjasama. Kesukaran ini masuk akal karena kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya kita yang kompleks membuat interaksi yang ideal itu sukar dilaksanakan. Dapat diduga bahwa kondisi pluralitas itu masih tetap akan hadir untuk waktu yang sangat lama di hadapan kita.

Kebijakan untuk mengembangkan integrasi umat beragama pada masa lampau lebih merupakan kebijakan politik yang kurang mempertimbangkan keterlibatan warga masyarakat secara penuh. Kebijakan

keagamaan, sebagaimana dikemukakan dalam uraian terdahulu, sangat mengandalkan tokoh-tokoh agama, pejabat agama, dan pejabat pemerintah untuk urusan agama, untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan dan rencana tindakan kebijakan integrasi umat beragama, tanpa memperhatikan suatu unsur terbesar dan terpenting yakni umat beragama tersebut. Kebijakan yang bersifat *taken for granted* itu antara lain yang membuat masyarakat umat beragama kita tetap bersifat pluralistik. Kerentanan masyarakat kita terhadap konflik-konflik umat beragama – dan beberapa kasus konflik yang nyata telah terjadi – membuktikan hal ini.

Salah satu ciri pluralistik itu tercermin dalam sistem pendidikan kita. Stereotip-stereotip mengenai suatu masyarakat atau kebudayaan banyak kita temukan dalam buku-buku pelajaran sekolah dasar dan menengah kita. Sebagai contoh saya kutipkan beberapa pernyataan dari buku-buku pelajaran tertentu sebagai berikut:

Contoh 1

“Masyarakat kita beragam dari segi lokasi geografi, penduduk, ekonomi, dan sosial. Ada

masyarakat yang sudah maju seperti di perkotaan, tetapi ada juga yang masih hidup di desa-desa dan daerah pedalaman. Berbeda dari masyarakat yang hidup di kota-kota, masyarakat yang hidup di desa masih serba ketinggalan. Banyak anak yang tidak bersekolah, sehari-hari mereka hanya bekerja di sawah. Keadaan inilah yang membuat mereka tertinggal dan hidup dalam kebodohan. Hal itulah yang harus kita tanggulangi, yaitu memerangi kemalasan dan kebodohan... (dst)." [Uraian ini dilengkapi dua gambar yang berdampingan, masing-masing gambar yang menunjukkan panorama desa dengan sawah, pematang, seorang petani sedang mencangkul, dan ada dua ekor kerbau sedang membajak sawah; dan satu gambar lagi menunjukkan panorama keramaian lalu lintas kota]

Contoh 2

"Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah adalah kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah bagi kehidupan keluarganya. Setiap hari, pagi-pagi sekali, ayah pergi

bekerja dan pulang sore hari. Ibu bertugas mempersiapkan kebutuhan keluarga di rumah. Pagi-pagi sekali ibu sudah bangun, mempersiapkan makanan bagi ayah yang akan pergi bekerja, dan anak-anak yang akan pergi ke sekolah. Setelah itu ibu mencuci pakaian, menjemur pakaian, dan kemudian menyetrika... (dst)." {Uraian ini dilengkapi dengan sebuah gambar yang menunjukkan ayah sedang membaca Koran, ibu sedang menjahit, dan dua anaknya duduk di lantai sedang bermain.]

Contoh 3

"Pada masa kini dalam masyarakat kita masih banyak orang yang mempercayai hal-hal yang berasal dari kepercayaan masa lampau seperti animisme, dinamisme, dan politeisme. Mereka belum tersentuh oleh agama-agama besar kita seperti Islam dan Kristen. Namun, upaya-upaya telah dijalankan untuk memajukan mereka, agar kelak mereka menyadari kekeliruan mereka dalam beragama, dan mulai menjalankan agama yang sebenarnya seperti kita.....-...." [Uraian ini dilengkapi gam-

bar seorang Muslim pergi ke mesjid, seorang Kristen pergi ke gereja, dan seseorang sedang duduk menyembah sebuah patung di hadapannya]

Banyak lagi contoh lain yang tersebar di dalam buku-buku pelajaran kita. Stereotip dalam buku-buku tersebut cukup jelas, yaitu penilaian atas penggolongan yang sempit namun menggeneralisir, pandangan subjektif yang tegas, dan orientasi atas-bawah yang kuat. Stereotip seperti ini lumrah ditemukan dalam masyarakat yang memiliki orientasi budaya pluralistik. Apabila kedua contoh di atas diposisikan secara kontekstual, maka untuk contoh1, “pembagian atas desa dan kota sebagai kurang maju dan maju menjadi relatif, karena banyak orang kota yang tidak maju cara berpikrnya, atau sebaliknya, cukup banyak orang desa yang berpikiran maju.” Dalam contoh 2, kita harus kritis bahwa “banyak wanita yang justru berperan sebagai kepala keluarga, apalagi banyak laki-laki (ayah) yang kini menganggur karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Atau, banyak laki-laki maupun wanita yang sama-sama bekerja

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.” Pada contoh 3, kita menyaksikan stereotype tentang monopoli benar atau salah. Secara kontekstual atau antropologis harus dijelaskan bahwa “keanekaragaman kebudayaan dan agama di tanah air adalah kekayaan kebudayaan kita. Setiap masyarakat atau kebudayaan memiliki logika dan nalar sendiri dalam memahami dan mempraktekkan agamanya”.

III

Penutup

Sebagai penutup tulisan ini, saya mengemukakan dua hal:

- 1 Dalam upaya mengembangkan integrasi umat beragama dalam masyarakat kita otoritas keagamaan harus dikembalikan ke tangan penganut agama itu sendiri karena hak beragama adalah bagian dari hak asasi manusia. Salah satu strategi yang harus dikembangkan adalah menghapuskan stereotip-stereotip mengenai umat beragama satu sama lain. Dari sini diharapkan berkembangnya sikap saling menghargai, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Negara

(baca: pemerintah) harus memposisikan diri sebagai fasilitator yang baik bagi pola interaksi yang baru itu.

- 2 Mengubah sistem pendidikan kita yang selama ini berorientasi pluralisme menjadi multikulturalisme. Perubahan ini menyangkut isi buku-buku ajar, metode belajar-mengajar, dan kesempatan bagi murid dan guru dari berbagai latar belakang kebudayaan—termasuk agama—untuk berinteraksi secara setara dan saling menghargai***

SUMBER BACAAN

Geertz, C. (1966) "Religion as a Cultural System," *Anthropological Approaches to the Study of Religion* (M.Banton, ed.). London: Tavistock.

Saifuddin, A.F. (2000) *Agama dalam Politik Keceragaman*. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Departemen Agama RI.

Tylor, E.B. (1967 [1871]) *Primitive Culture: Researches in the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom*. London: John Murray.